

DAFTAR ISI
RENSTRA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
TAHUN 2016 – 2021

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Istilah dan Singkatan (<i>Glossary</i>)	vii
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Batam	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	11
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Batam	15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Batam	19
BAB III Isu – Isu Strategis, Tugas dan Fungsi	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	25
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Pemerintah Kota Batam.....	36
3.3 Telaahan Restra Kemendikbud dan Kota Batam.....	37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	52

BAB IV	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2016-2021	68
4.1	Visi Dinas Pendidikan Kota Batam	68
4.2	Misi Dinas Pendidikan Kota Batam.....	70
4.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan.....	70
4.4	Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan.....	73
Bab V	Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Keluaran, Sasaran dan Pendanaan Indikatif	82
Bab VI	Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Kota Batam	106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batam

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Jumlah PNS berdasarkan Golongan dan Non PNS
- Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Pejabat Eselon Dinas Pendidikan Kota Batam
- Tabel 2.3 Jumlah Tenaga Pendidik pada setiap Satuan Pendidikan berdasarkan
Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.4 Jumlah Guru Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian
- Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada setiap satuan pendidikan
- Tabel 2.6 Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas
- Tabel 2.7 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Batam
- Tabel 3.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Batam
Quick Appraisal
- Tabel 3.2 Penentuan Isu-isu Strategis
- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan
- Tabel 5.1 Indikator Capaian Bidang Pendidikan
- Tabel 5.2 Rencana Program dan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif
- Tabel 6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN (GLOSSARY)

A

APBN = Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

APBD = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APK = Angka Partisipasi Kasar

APM = Angka Partisipasi Murni

APS = Angka Partisipasi Sekolah

ASEAN = *Assosiation of South East Asia Nations*

B

BAN = Badan Akreditasi Nasional

BAN-PNF = Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal

BAN-PT = Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

BAN-SM = Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah

BANS/BANM = Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

BAPPENAS = Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

K/L = Barang Milik Negara Kementerian/Lembaga

BKM = Bantuan Khusus Murid

BOP = Biaya Operasional Penyelenggara

BOS = Bantuan Operasional Sekolah

BPK = Badan Pemeriksa Keuangan

BPKB = Balai Pengembangan Kegiatan Belajar

BPKP = Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BPPNFI = Balai Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal

BSNP = Badan Standar Nasional Pendidikan

C

CTL = *Contextual Teaching and Learning* (Pembelajaran Kontekstual)

D

DAK = Dana Alokasi Khusus

DAU = Dana Alokasi Umum

DBH = Dana Bagi Hasil

Dekonsentrasi = Pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat

Diklatpim = Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Ditjen = Direktorat Jenderal

DN = Dalam Negeri

DPR = Dewan Perwakilan Rakyat

Distance Learning = Pembelajaran Jarak Jauh

DSS = *Decision Support System*

E

EDI = *Education Development Index*

EFA = *Education for All*

G

Gender = kesamaan peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan, kaya miskin, orang cacat dan tidak, desa kota, atau sifat-sifat yang dilekatkan pada laki-laki atau perempuan yang dibangun oleh sosial dan budaya

H

HDI = *Human Development Index*

HET = Harga Eceran Tertinggi

I

IKK = Indikator Kinerja Kegiatan

IKU = Indikator Kinerja Utama

Inpres = Instruksi Presiden

IPA = Ilmu Pengetahuan Alam

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IPS = Ilmu Pengetahuan Sosial

IPTEK = Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

ISO = *International Organization for Standardization*

ITJEN = Inspektorat Jenderal

J

Jardiknas = Jejaring Pendidikan Nasional

K

KBK = Kurikulum Berbasis Kompetensi Kemdiknas =
Kementerian Pendidikan Nasional

Kemdikbud = Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KKN = Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

KKG = Kelompok Kerja Guru

KKKS = Kelompok Kegiatan Kepala Sekolah

KKPS = Kelompok Kegiatan Pengawas Sekolah

KPJM = Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah

KTSP = Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

L

LAKIP = Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Litbang = Penelitian dan Pengembangan

LKP = Lembaga Kursus dan Pelatihan

LPMP = Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

LPTK = Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan

LSK = Lembaga Sertifikasi Kompetensi

M

MA = Madrasah Aliyah

MBS = Manajemen Berbasis Sekolah

MDGs = *Millennium Development Goals*

Mendikbud = Menteri Pendidikan dan kebudayaan

MGMP = Musyawarah Guru Mata Pelajaran

MI = Madrasah Ibtidaiyah

MKKS = Musyawarah Kerja Kepala Sekolah

MKPS = Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah

Musrenbang = Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional

MTs = Madrasah Tsanawiyah

N

NKRI = Negara Kesatuan Republik Indonesia

P

P4TK = Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PAUD = Pendidikan Anak Usia Dini

PBB = *Performance Based Budgeting* (penganggaran berbasis kinerja)

PDB = Produk Domestik Bruto

Permendikas = Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

PKBM = Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

PKH = Pendidikan Kecakapan Hidup

PNBP = Pendapatan Negara Bukan Pajak Posyandu =

Pos Pelayanan Terpadu

PP = Peraturan Pemerintah

PPB = Pengembangan Profesional Berkelanjutan

PT = Perguruan Tinggi

PTK-PNF = Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Pendidikan Nonformal

PTN = Perguruan Tinggi Negeri

PTS = Perguruan Tinggi Swasta

PUG = Pengarusutamaan Gender

Prodi = Program Studi

PTK PAUD = Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini

R

RA = Raudhatul Athfal

RKA-KL = Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga

Renstra = Rencana Strategis

Renja = Rencana Kerja

RI = Republik Indonesia

RKB = Ruang Kelas Baru

RPJMN = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJPN = Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

RPPNJP = Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang

RSBI = Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

S

S-1 = Strata 1 (sarjana)

S-2 = Strata 2 (magister)

S-3 = Strata 3 (dokter)

Sakernas = Survei Angkatan Kerja Nasional

SAI = Sistem Akuntansi Instansi

Satker = Satuan Kerja

SBI = Sekolah Bertaraf Internasional

SD = Sekolah Dasar

SDA = Sumber Daya Alam

SDM = Sumber Daya Manusia

Setjen = Sekretariat Jenderal

SIM = Sistem Informasi
Sisdiknas = Sistem Pendidikan Nasional
SKB = Sanggar Kegiatan Belajar
SKL = Standar Kompetensi Lulusan
OPD = Organisasi Perangkat Daerah
SLB = Sekolah Luar Biasa
SM = Sekolah Menengah
SMA = Sekolah Menengah Atas
SMK = Sekolah Menengah Kejuruan
SMP = Sekolah Menengah Pertama
SNP = Standar Nasional Pendidikan
SOP = Standar Operasi dan Prosedur
SPI = Sistem Pengendalian Internal
SPM = Standar Pelayanan Minimal

T

Tata Nilai = Pandangan hidup dan kesepakatan atas norma dalam mengelola organisasi

TBM = Taman Bacaan Masyarakat

Tendik = Tenaga Pendidik

TIK = Teknologi Informasi dan Komunikasi

TK = Taman Kanak-Kanak

TUK = Tempat Uji Kompetensi

U

UASBN = Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional

UKS = Usaha Kesehatan Sekolah

UNSMP = Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama

UPT = Unit Pelaksana Teknis

USB = Unit Sekolah Baru

UU = Undang-Undang

UU 1945 = Undang-Undang Dasar 1945

V

Vokasi = Keahlian terapan

W

Wajar = Wajib Belajar

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2016 - 2021. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan RENSTRA dimaksudkan untuk menetapkan standar ukuran keberhasilan pembangunan selama lima tahun yaitu tahun 2016 – 2021 dibidang Pendidikan sekaligus sabagai dasar evaluasi keberhasilan program dan kegiatan dalam tiap tahunnya.

Penyusunan Renstra dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk berinteraksi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam, partisipasi seluruh pejabat Dinas Pendidikan Kota Batam, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pembangunan pada bidang pendidikan sampai dengan saat ini.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2016 - 2021 digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pada bidang pendidikan yang hendak dicapai Dinas Pendidikan Kota Batam pada periode 2016 - 2021.

Renstra ini penting untuk dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran di Dinas Pendidikan Kota Batam dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021 Dinas Pendidikan Kota Batam bertujuan untuk memberikan arah dan acuan kerja dalam rangka menata dan membenahi organisasi, sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pendidikan, dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Batam.

Batam, 30 Januari 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA
BATAM

MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19580412 198703 1 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tujuan Pendidikan Nasional sesuai yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan harus mampu membentuk bangsa Indonesia menjadi manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Pendidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam pembangunan. Perkembangan zaman yang semakin cepat dan semakin kompleks, menuntut tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk itu, melalui pendidikan diharapkan mampu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang diharapkan.

Pada tingkat Nasional, program yang dilaksanakan tetap mengacu pada 4 program strategis yaitu peningkatan mutu pendidikan, peningkatan pemerataan pendidikan, peningkatan efisiensi pendidikan dan relevansi pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan program strategis yang terus diupayakan

penuntasannya secara nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pendidikan merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa tugas dan kewenangan pendidikan dasar menjadi tanggung jawab Kabupaten/Kota.

Pembangunan dibidang pendidikan merupakan salah satu program prioritas dari Pemerintah Kota Batam. Upaya meningkatkan SDM terus dikembangkan, diantaranya melalui Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yaitu suatu upaya penanganan anak sejak dini pada masa *golden age*. Demikian juga pada setiap jenjang pendidikan, terus diupayakan pengembangan infrastruktur dan sarana pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan dan peningkatan kreativitas kegiatan siswa.

Kondisi penyelenggaraan pendidikan di Kota Batam, masih dihadapkan kepada berbagai masalah, baik berkenaan dengan masalah sarana dan prasarana, biaya pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, maupun mengenai pengelolaan pendidikan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dirumuskanlah Visi Dinas Pendidikan sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTAQWA, BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING,**

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Pendidikan Nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa dan kualitas Sumber daya Manusia, mengembangkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan, keahlian dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, serta kepribadian yang mantap dan mandiri. Pendidikan Nasional juga harus menumbuhkan dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, wawasan keunggulan, kesetiakawanan sosial dan kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan serta berorientasi ke masa depan.

Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan secara terpadu dan serasi, baik antar berbagai jalur, jenis dan jenjang pendidikan maupun antar sektor pendidikan dengan sektor pembangunan lainnya serta antar daerah dengan menggunakan manajemen pendidikan yang

makin mutakhir, efektif dan efisien serta mengutamakan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan menengah umum.

Pendidikan dirumuskan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah dan koperasi, guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

Daerah memiliki kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Pendekatan yang digunakan dalam merencanakan pembangunan adalah melalui perencanaan partisipatif dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai stakeholders. Dengan demikian, wujud perencanaan pembangunan diharapkan dapat sinergi antara *top-down planning* dan *bottom up planning* berbasis anggaran, terpadu dan terprogram.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan semua program dan kebijakan tersebut, maka disusun perencanaan strategis Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan Pendidikan dengan menyusun Rencana Strategis Dinas Pendidikan merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Dinas Pendidikan yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ialah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah,

Strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas Organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2016—2021 adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No. 25 Th 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005—2025;
6. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Batam;
12. Peraturan Walikota Batam Nomor 61 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Kota Batam

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra ini agar Dinas Pendidikan Kota Batam

memiliki pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan khususnya di bidang pendidikan, sesuai dengan yang diharapkan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2016 – 2021. Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan penjabaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Batam tahun 2016 – 2021. Selanjutnya Renstra OPD menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Renja OPD dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran – sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut menjelaskan komponen – komponen peningkatan layanan pendidikan yang harus di sediakan untuk mencapai sasaran, tujuan strategis, komponen – komponen tersebut meliputi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, data dan informasi, dana serta antar satuan pendidik yang di selenggarakan pemerintah dan masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Dinas Pendidikan Kota Batam dalam pelaksanaan pembangunan dibidang pendidikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi pembangunan bidang pendidikan di Kota Batam, meliputi :

1. Mengidentifikasi sejumlah permasalahan pendidikan di Kota Batam

yang diperkirakan menghambat pencapaian visi dan misi Dinas Pendidikan Kota Batam dalam mewujudkan program unggul, nyaman dan sejahtera.

2. Mendapatkan gambaran tentang kondisi, potensi dan ketersediaan sumber daya bidang pendidikan di Kota Batam, sehingga mampu mengoptimalkan potensi yang ada dan mengalokasikan sumber daya serta dana secara lebih efisien.
3. Menyusun sejumlah langkah aksi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
4. Membangun agenda dan langkah kerja yang sistematis guna mendukung dan mengimplementasikan kebijakan strategis Pemerintah Kota Batam ke dalam sejumlah langkah dan kegiatan yang lebih operasional dan implementatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam

Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi uraian tentang latar belakang, Landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penyusunan Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan

Memuat informasi tentang peran, tugas dan fungsi Dinas Pendidikan

Kota Batam dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah: tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.

BAB III Isu – Isu Strategis, Tugas dan Fungsi

Bagian ini menyajikan informasi mengenai: identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan: telaahan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih, telaahan renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan bidang pendidikan di Kota Batam.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI Indikator Kinerja Dinas Pendidikan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bagian ini menyajikan indikator kinerja Dinas Pendidikan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan

dan sasaran RPJMD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai Organisasi Perangkat Daerah Kota Batam yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam membantu Walikota Batam dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelarasan RPJMD dan Renstra akan membuat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Batam menjadi lebih optimal.

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pendidikan serta tugas lain yang diberikan Walikota.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Pendidikan Kota Batam mempunyai fungsi: Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan pembinaan ketenagaan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah

- menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan pembinaan ketenagaan;
3. pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah menengah pertama, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, dan pembinaan ketenagaan; dan
 4. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batam

Struktur organisasi perangkat daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kota Batam dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang dibantu oleh seorang sekretaris dan empat orang kepala bidang teknis. Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris

- a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan
- c. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

- a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
- b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- c. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

4. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

- a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
- b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
- c. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

5. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal

- a. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian
- b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana

c. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

6. Kepala Bidang Ketenagaan

a. Kepala Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal

b. Kepala Seksi PTK SD

c. Kepala Seksi PTK SMP

7. UPTD

a. UPTD Kecamatan Belakang Padang

b. UPTD Kecamatan Galang

c. UPTD Kecamatan Bulang

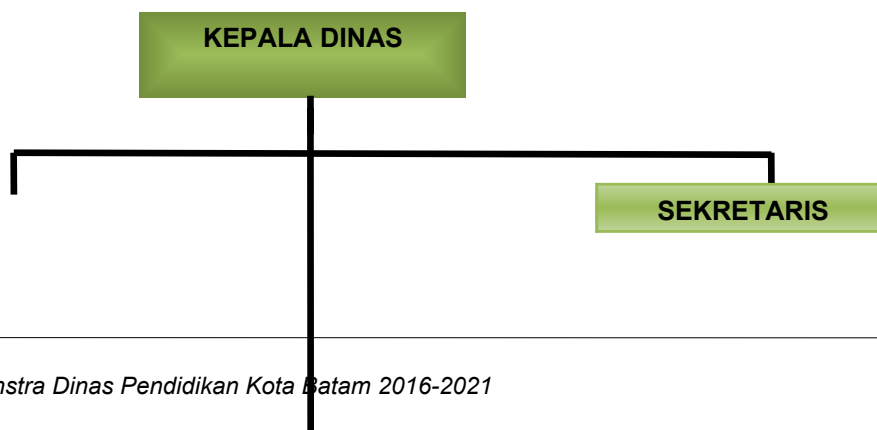
d. Sanggar Kegiatan Belajar

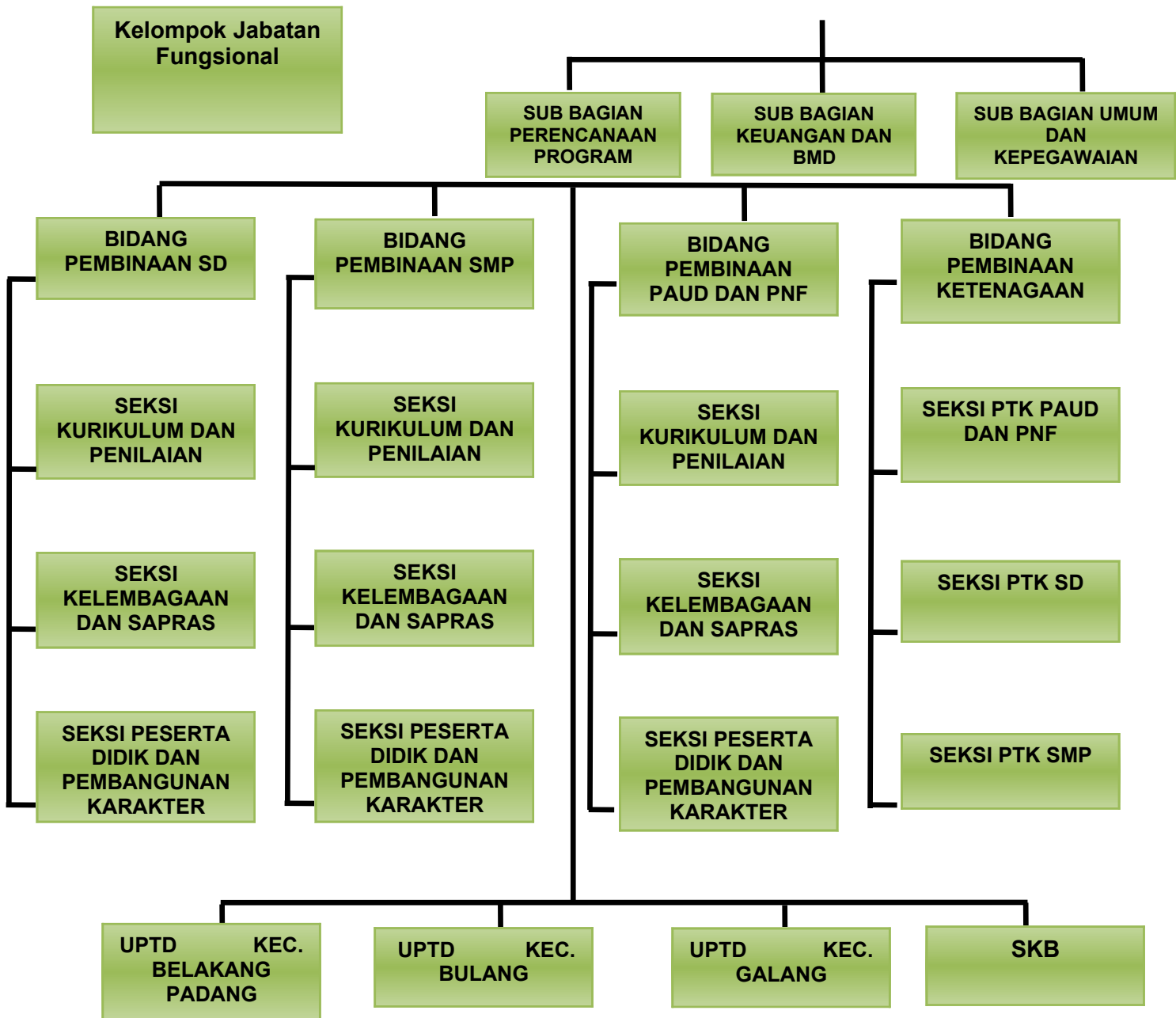
8. Jabatan Fungsional

9. Jika ditinjau dari struktur organisasinya, maka dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.

Diagram Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Batam





2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Batam

Dalam melaksanakan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta membantu Walikota Batam dalam merancang dan merumuskan kebijakan bidang pendidikan, Dinas Pendidikan Kota Batam didukung oleh sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya

anggaran, dan sumber daya sarana dan prasarana

2.2.1 Sumber Daya Dinas Pendidikan Kota Batam

1. Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Kota Batam (tidak termasuk guru, pengawas, penilik dan pamong belajar) sampai dengan Bulan Desember 2016 sebanyak : 96 orang. Jumlah tersebut meliputi tenaga administrasi kependidikan yang tersebar pada: Sekretariat, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan SD, Bidang Pembinaan SMP, Bidang Pembinaan Ketenagaan serta 3 UPT cabang Dinas (Unit Pelaksana Teknis Cabang Dinas Pendidikan).

Tabel 2.1
Jumlah PNS Berdasarkan Golongan dan Non PNS

No.	Uraian	Jumlah	
1.	Golongan I	0	
2.	Golongan II	9	
3.	Golongan III	32	
4.	Golongan IV	18	

5.	Non PNS		37
Jumlah		59	37
Jumlah Keseluruhan		96	

Tabel 2.2.

Tingkat Pendidikan Pejabat Eselon Dinas Pendidikan Kota Batam

NO	URAIAN	TINGKAT PENDIDIKAN							JML
		SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3	
I	STRUKTURAL								
	a. Eselon II	-	-	-	-	-	1	-	1
	b. Eselon III	-	-	-	-	3	2	-	5
	c. Eselon IV	-	-	-	-	8	7		15
	JUMLAH	-	-	-	-	11	10	-	21

Tenaga pendidik yang merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Batam berjumlah 10.210 orang. Dilihat dari status kepegawaiannya sebanyak 69.74% dari jumlah tersebut merupakan tenaga pendidik (guru) non PNS. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Tenaga Pendidik Pada Setiap Satuan Pendidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang	Kualifikasi Pendidikan							Total
		<=SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	TK	0	500	16	37	1.209	11	1	1.774
2	SD	400	17	92	152	5.872	143	0	6.676
4	SMP	102	7	8	48	1.521	73	1	1.760
Total		539	525	118	289	10.708	339	2	10.210

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

Tabel:2.4

Jumlah Guru Menurut Jenjang dan Status Kepegawaian

No	Jenjang	Status PNS dan NON PNS		Total
		PNS	NON PNS	
1	TK	56	1.718	1.774
2	SD	2.400	4.276	6.676
3	SMP	633	1.127	1.760
Total		3.089	7.121	10.210

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

2. Keadaan Penduduk Usia Sekolah dan Siswa

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Usia Sekolah pada Setiap Satuan Pendidikan

Penduduk Usia Sekolah		Keadaan Siswa	
Usia	Jumlah	Satuan Pendidikan	Jumlah
Usia 4-6 Tahun	64.024	TK/PAUD	20.482
Usia 7-12 Tahun	118.502	SD/MI	114.844
Usia 13-15 Tahun	41.088	SMP/MTS	37.297
Usia 16-18 Tahun	38.992	SMA/MA/SMK	34.897

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

3. Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Tabel 2.6
Jumlah Sekolah dan Kondisi Ruang Kelas

Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah	Ruang Kelas			
		Jumlah	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sdg/Brt
TK/PAUD	500	1032	506	511	15
SD	344	3.007	1.469	1.383	155
MI	33	220	153	57	10
SMP	143	1.107	580	474	53
MTs	18	107	73	27	7
JUMLAH	1.038	5.473	2.781	2.452	240

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Batam

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya. menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan OPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Adapun tabel yang perlu disajikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7
Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Kota Batam

NO	USULAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET					
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
	PENDIDIKAN							
1	Program PAUD Pendidikan Non Formal dan Pembinaan Kesiswaan	SUB JUMLAH TOTAL ;		14	13	14	14	14
		Rasio PAUD/TK per Kecamatan /Penduduk	-	1	0	1	1	1
		Rasio alat bermain/alat pragra TK dgn jml TK yang tersedia	1	3	3	3	3	3
		Penambahan Ruang Kelas Baru	-	3	3	3	3	3
		Varia Pendidikan dan Lomba Langgam Melayu SD, SMP, SMA/SMK	1	1	1	1	1	1
		Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa (Budi Pekerti)	1	1	1	1	1	1
		Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional	1	3	3	3	3	3
		Peningkatan Kompetensi Siswa Akademik dan Non Akademik	-	1	1	1	1	1
		Pelaksanaan Tri out Ujian Nasional	-	1	1	1	1	1
		Pembinaan Kelompok Belajar Usaha (KBU)	-	1	1	1	1	1

2	PROGRAM PENINGKATAN KETERSEDIAAN DAN KETERJANGKAUAN PEYANAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	SUB JUMLAH TOTAL ;		2377	2720	2762	3097	3504
		Jumlah USB SD/SMP dgn jml penduduk usia sekolah masih kurang	-	2	2	2	2	2
			-	2	2	2	2	2
		Persentase jml siswa SD/SMP rata-rata UN menurut jenjang pendidikan	-					
		Jml RKB SD/SMP dgn jml siswa percls (1.36) belum mencukupi	37	45	45	45	50	55
			12	30	30	35	40	48
		Lantai laboratorium, lap olahraga, perpustakaan, MCK, majelis guru	-	11	11	11	11	11
		Pengadaan Muebiler Sekolah SD/SMP Filling cabinet sekolah SD/SMP	700	400	400	450	500	500
		Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah (RDK), Rumah Dinas Jaga (RDJ), Rumah Dinas Guru (RDG) SD/SMP Hinterland	-	4	4	4	4	4
		Pemb. Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan Batu Miring Sekolah SD/SMP	10	30	30	30	30	30
		Rehab berat Gedung SD, SMP (REVITALISASI)	15	2	2	2	2	2
			-	3	3	3	3	3
		Rehab sedang/berat RKB SD, SMP	-	5	5	5	5	5
			-	1	1	1	1	1
		Rehabilitasi Sedang/Berat RDK/RDG/RDJ Daerah Hinterland SD, SMP	-	3	3	3	3	3
			-	2	1	1	3	1
		Subsidi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (SBOSD) TK, SD, SMP dan siswa berprestasi	250	1	1	1	1	1
		Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dan ISO	70	1	1	1	1	1
		Kelompok Belajar Paket A dan B	100	80	93	110	75	98
		Olympiade Sains SD/SMP	50	445	575	525	645	785

		Pelatihan Pendidikan Berkerakter dan Akhlak Mulia SD/SMP	-	1	1	1	1	1
		Implementasi Kurikulum pendidikan madani dan Muatan Lokal SD/SMP	-	1	1	1	1	1
		Pembangunan Peningkatan Mutu SD / SMP (DAK)	68	10	10	10	10	10
		Jml GSB SMA/SMK dgn jml penduduk usia sekolah masih kurang	-	1	1	1	1	1
		Jumlah RKB SMA/SMK dgn jml siswa percls (1.36) belum mencukupi	-	6	6	6	6	6
			-	6	6	6	6	6
		Pembangunan Laboratorium dan Ruang Workshop Penunjang SMA/SMK	-	2	2	2	2	2
		Pengadaan Muebiler Sekolah SMA/SMK	-	500	500	500	500	500
		Pemb. Taman, Lapangan Upacara, Pagar dan Batu Miring Sekolah SMA/SMK	-	5	6	6	4	27
		Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SMA/SMK	-	1	1	1	1	1
		Pemberian Beasiswa Miskin, dan Prestasi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	-	1	1	1	1	1
		Lomba Kompetensi Siswa (LKS) siswa SMK	1	250	300	350	400	450
		Kelompok Belajar Paket C	100	80	100	120	140	160
		Olympiade Sains SMA/SMK	50	445	575	525	645	785
		Pembelajaran Berbasis ICT dan Re Engenering SMA/SMK	-	1	1	1	1	1
		Sosialisasi Bahaya Merokok terhadap anak sekolah	-	0	1	1	1	1
3	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	SUB JUMLAH TOTAL ;		305	275	283	295	302
		Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	-	100	80	80	80	80
		Jaringan Sistem Informasi dan Schoolnet Pendidikan	12	70	10	10	10	10
		Pemetaan dan Statistik Pendidikan	12	1	1	1	1	1
		Penyusunan perencanaan program kegiatan dinas pendidikan	1	1	1	1	1	1
		Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam	1	1	1	1	1	1
		Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	100	0	40	40	40	40

		Peningkatan Mutu Guru dan Pembelajaran SD/SMP	1	1	1	1	1	1
		Peningkatan Mutu Guru dan Pembelajaran SMA/SMK	1	1	1	1	1	1
		Pelatihan Manajerial Kepala, Pengawas dan Penilik Sekolah	-	1	1	1	1	1
		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pustakawan, Laboran, dan TIK	-	30	35	40	50	55
		Pemilihan Siswa dan Guru Berprestasi dan Kepsek Berprestasi	200	1	1	1	1	1
		Peningkatan Kompetensi Kualifikasi dan Sertifikasi Guru	200	1	1	1	1	1
		Persentase ketersediaan fasilitas sarana alat media dan alat praga pendidikan untuk peningkatan mutu pendidikan	10	20	20	20	20	20
		Pengadaan Mesin CNC/Rebotic dan ICT SMA/SMK	-	6	6	6	6	6
		Workshop KKG/MGMP Pendidikan Dasar	-	70	75	78	80	82
		Workshop KKG/MGMP Pendidikan Menengah	-	1	1	1	1	1
SUB JUMLAH PROGRAM WAJIB ;								
4	PENINGKATAN PELAYANAN KEUANGAN DAERAH	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	1	1	1	1	1
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SD Kec. Galang (24 sek)	-	4	4	4	4	4
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SD Kec. Bel.Padang (15 sek)	-	4	4	4	4	4
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SD Kec. Bulang (11 sek)	-	4	4	4	4	4
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK/SD dan SKB di Kec. Kota (9 Kec)		4	4	4	4	4
		Penunjang Kegiatan Rutin Sekolah SMP (45 Sekolah)	1	1	1	1	1	1
		Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 1 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 2 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 3 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 4 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 5 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 6 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 7 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 8 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 9 Batam						

	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 10 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 11 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 12 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 13 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 14 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 15 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 16 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 17 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 18 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 19 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 20 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 21 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 22 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 23 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 24 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 25 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 26 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 27 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 28 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 29 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 30 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 31 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 32 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 33 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 34 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 35 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 36 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 37 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 38 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 39 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 40 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 41 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 42 Batam						
	Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 43 Batam						

		Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 44 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMPN 45 Batam						
		Penunjang Kegiatan Rutin Sekolah SMA (17 Sekolah)	0	1	1	1	1	1
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 1 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 2 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 3 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 4 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 5 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 6 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 7 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 8 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 9 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 10 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 11 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 12 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 13 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 14 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 15 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 16 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMAN 17 Batam						
		Penunjang Kegiatan Rutin Sekolah SMK (6 Sekolah)	0	1	1	1	1	1
		Kegiatan Rutin Sekolah SMKN 1 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMKN 2 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMKN 3 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMKN 4 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMKN 5 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMKN 6 Batam						
		Kegiatan Rutin Sekolah SMKN 7 Batam						
5	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1	1	1	1	1	1
6	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR	Peningkatan sumber daya aparatur dan disiplin aparatur	100	140	150	170	190	210

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS, TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Organisasi Dinas Pendidikan Kota Batam menghadapi masalah lingkungan strategis baik lingkungan internal maupun eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi berada diluar kendali organisasi, tetapi ikut mempengaruhi kinerja organisasi dalam merumuskan langkah-langkah yang strategis.

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan PAUD dan nonformal, dan Bidang Ketenagaan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkungan strategis dinas pendidikan, baik internal meliputi kekuatan (***strengths***) dan kelemahan (***weaknesses***) maupun lingkungan eksternal meliputi peluang (***opportunities***) dan ancaman (***threats***). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

3.1.1 Lingkungan Internal

a. Kekuatan/*Strengths* (s)

- Adanya komitmen dari seluruh jajaran pendidikan Kota Batam untuk melaksanakan pembangunan Pendidikan secara berkesinambungan, bersinergi menuju arah sasaran peningkatan mutu dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, terukur dan terkendali;
- Adanya perbaikan yang konsisten dari seluruh stakeholder pendidikan Kota Batam untuk mendukung dan memantapkan program yang dirumuskan dalam visi Dinas Pendidikan Kota Batam;
- Tersedianya sumber daya aparatur kependidikan yang potensial untuk dibina dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan Pendidikan;
- Tersedianya perangkat organisasi penyelenggara pendidikan mulai dari tingkat kota, kecamatan sampai sekolah. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan UPT cabang dinas pada tiga Kecamatan Hinterland (kepulauan) untuk melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- Tersedianya program beasiswa bagi siswa berprestasi kurang mampu;
- Animo masyarakat terhadap pendidikan semakin meningkat.

b. Kelemahan /*Weaknesses* (w)

Dalam kehidupan sosial, masih muncul berbagai permasalahan yang dirasakan oleh mayoritas masyarakat sebagai akibat belum stabilnya kondisi Ekonomi. Dampaknya banyak orang tua yang

ingin anaknya bersekolah pada sekolah negeri karena gratis. Di sisi lain, peningkatan dan pemerataan sarana dan prasarana Pendidikan masih perlu mendapat perhatian yang cukup serius, mengingat daya tampung siswa saat ini masih belum memenuhi akan kenyamanan dan ketenangan dalam proses belajar mengajar. Dalam pemenuhan prasarana Pendidikan masih mengalami kendala dikarenakan keterbatasan lahan yang hak kewenangan pengelolaan lahan bukan pada pemerintah Kota Batam, sementara itu Otonomi Daerah telah merangsang perubahan Aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan cakupan layanan pendidikan. Di lain pihak, kemampuan tenaga kependidikan untuk mengemban tugasnya secara profesional melalui pelatihan – pelatihan masih perlu ditingkatkan. Pembangunan pendidikan didalamnya mencakup tujuan pendidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, guru, metoda pembelajaran, dan murid.

➤ **Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Akses dan pemerataan pendidikan adalah.**

- 1) Belum terpenuhinya kapasitas daya tampung sekolah;
- 2) Tingginya tingkat kerusakan bangunan sekolah yang ada;
- 3) Tidak meratanya penyebaran sekolah dan penyebaran penduduk;
- 4) Hak pengelolaan lahan untuk peningkatan prasarana pendidikan kewenangannya bukan pada Pemerintah Kota Batam;

- 5) Masih terdapat sebagian masyarakat yang kemampuan ekonominya masih rendah sehingga berkeinginan kuat untuk memasukan anaknya pada sekolah negeri dengan mengabaikan keberadaan sekolah swasta.

➤ **Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan mutu pendidikan adalah :**

- 1) Kurang meratanya kualitas kemampuan profesionalisme guru dalam strategi, metode dan evaluasi pembelajaran;
- 2) Terdapat kesenjangan dalam fasilitas sarana penunjang pembelajaran pendidikan yang bermutu belum merata pada seluruh sekolah, seperti perpustakaan dan laboratorium serta media pembelajaran;
- 3) inovasi dalam perencanaan kurikulum belum merata pada semua sekolah;
- 4) media belajar siswa belum mendapat perhatian baik di setiap sekolah;
- 5) kebijakan dan implementasi kebijakan pengembangan perpustakaan sekolah sebagai media belajar masih lemah;
- 6) Kurang optimal pemberdayaan fungsi MGMP dan KKG dalam meningkatkan pembaharuan kegiatan belajar melalui kerja sama antara guru;
- 7) belum tercipta kegiatan yang dapat menampilkan produk karya

secara kompetitif untuk guru.

➤ **Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan relevansi**

pendidikan adalah:

- 1) Pembelajaran kepada siswa dalam meningkatkan kompetensi masih bersifat klasikal;
- 2) Kurangnya pembinaan siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler maupun intrakurikuler;
- 3) kurangnya sekolah dalam mewadahi siswa yang berprestasi;

➤ **Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan Efisiensi**

pendidikan adalah :

- 1) Kemampuan manajerial sekolah dalam mengembangkan pelayanan pendidikan belum merata pada seluruh sekolah;
- 2) Kebijakan ke arah pengembangan budaya belajar melalui pengembangan sekolah sebagai organisasi belajar masih lemah;
- 3) Belum tersedianya data pendidikan yang akurat dan tepat sebagai acuan dalam perencanaan dan pengawasan hal ini dikarenakan belum adanya tenaga fungsional khusus pendataan, kurang peduli terhadap pentingnya data bagi perencanaan dan pengawasan;
- 4) Kurangnya dukungan dana operasional dan alat transportasi untuk pendataan:
- 5) masih rendahnya kinerja manajemen birokrasi pendidikan,

sehingga kurang tersedianya data pendidikan yang mutakhir dan akuntabel yang bisa dijadikan acuan bagi perencanaan dan pengendalian program pendidikan;

6) pengelolaan bantuan keuangan terhadap sekolah maupun siswa perlu terpantau dengan baik untuk meningkatkan pemberdayaan dana secara efektif;

3.1.2 Lingkungan Eksternal

a. Peluang/*Opportunities* (o)

- Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar;
- Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
- Kecenderungan meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), provinsi (APBD Provinsi), maupun kota (APBD Kota) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan;
- Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

- Kepedulian dunia usaha dalam pembangunan sektor pendidikan melalui program CSR (*corporate social responsibility*)-nya dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan;
- Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS), baik untuk tingkat pendidikan dasar maupun menengah;
 - b. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antar fungsi baik di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

c. Ancaman/Threats

- Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun semakin meningkat;
- Aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar masih belum merata, terutama untuk daerah-daerah hinterland;
- Angka kemiskinan relatif tinggi;
- Masih terdapat perusahaan yang merekrut karyawan/karyawatnya pada penduduk yang masih usia sekolah;

Dengan berpijak pada analisis lingkungan internal dan eksternal sebagaimana tergambar di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

3.1.3 STRATEGI S-O

- Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
- Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
- Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
- Lebih meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri dalam peningkatan dana CSR;
- Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di internal maupun eksternal;
- Meningkatkan kerjasama pembangunan pada sector pendidikan dengan wilayah-wilayah yang ada di sekitar wilayah perbatasan.

3.1.4 STRATEGI W-O

- Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas melalui pemanfaatan dukungan anggaran APBN dan APBD Provinsi;
- Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi tenaga pendidik melalui pengiriman pendidikan dan pelatihan;
- Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini;
- Meningkatkan kompetensi pengelola data melalui pemanfaatan teknologi informasi pada satuan pendidikan;
- Meningkatkan rekrutmen guru honor daerah;
- Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun Pendidikan Usia Dini.

3.1.5 STRATEGI S-T

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan/program pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini;
- Menambah jumlah satuan/program pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini;
- Menjalin berbagai kerjasama dengan *stakeholder* pendidikan;

- Meningkatkan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
- Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini;
- Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan nonformal.

3.1.6 STRATEGI W-T

- Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
- Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada jenjang pendidikan dasar maupun pendidikan anak usia dini;
- Meningkatkan daya tampung sekolah;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal;
- Meningkatkan peran pengusaha dan *stakeholder* pendidikan dalam pembangunan pendidikan.

3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Pemerintah Kota Batam

Visi Kota Batam Tahun 2016-2021 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah :

“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”

Ada pun misinya adalah :

- a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel, dan mengayomi;
- b. Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan masyarakat yang sejahtera;
- c. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa;
- d. Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah;
- e. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik;
- f. Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian kota Batam. Dari enam misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor pendidikan terdapat pada misi ke-dua.

Dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah:

- a. Mewujudkan Pelayanan Pendidikan yang Unggul, merata, terbuka, terjangkau dan agamis dan bertaqwa;
- b. Meningkatkan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- d. Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, pendapatan penduduk, distribusi pendapatan, dan penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran.

Dari empat tujuan di atas, tujuan pertama langsung mengerucut pada tujuan pembangunan sektor pendidikan, dengan sasarannya yaitu: ***“Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik”***.

3.3 Telaahan Renstra Kemendikbud dan Kota Batam

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan serta Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik. RPJMN Tahun 2015-2019 tersebut, selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban untuk mencapai Visi Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Visi Kemendikbud 2019:

“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan

yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”

Dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 5 (lima) Misi Pendidikan Nasional adalah:

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik

Misi Renstra Kemendikbud 2015—2019 dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan perilaku yang mandiri dan berkepribadian;
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);

3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi;

4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional;

mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien.

Strategi merupakan upaya yang sistematis melalui pengintegrasian dari tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan untuk mencapai misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang telah ditetapkan. Keenam strategi pembangunan pendidikan nasional pada periode lima tahun mendatang adalah :

1. Penguatan Peran Siswa, Guru, Tenaga Kependidikan, Orang tua, dan Aparatur Institusi Pendidikan dalam Ekosistem Pendidikan

Tujuan strategis ini merupakan penjabaran dari apa yang sudah disebut dalam visi sebagai insan pendidikan, yang akan mendapat perhatian lebih besar. Penguatan peran dari berbagai insan pendidikan akan menjadi fokus utama dalam lima tahun ke depan. Hal ini merupakan kelanjutan dan penyempurnaan dari fokus utama era sebelumnya yang lebih menekankan kepada pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, atau aspek pelayanan dari negara di bidang pendidikan. Penguatan peran dimaksud berarti mendorong peran aktif di satu sisi, dan meningkatkan kemampuan dalam berperan di sisi lainnya.

Siswa yang selama ini lebih diposisikan sebagai objek, akan semakin dilibatkan menjadi subjek pendidikan. Pelibatan siswa secara teknis akan disesuaikan dengan jenjang pendidikan, seperti PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Semakin tinggi jenjang, semakin besar pula peran serta aktifnya. Pada jenjang pendidikan menengah, pelibatan siswa di kelas secara interaktif diharapkan mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Pada semua jenjang, peningkatan keterlibatan siswa itu antara lain ditandai oleh meningkatnya perilaku positif siswa.

Penguatan peran guru dan tenaga pendidikan akan lebih ditujukan kepada meningkatnya kualitas sikap mereka dalam hal kepribadian, kesolehan dan moral sosial. Hal itu dilakukan dengan tetap melakukan upaya peningkatan mutu, kompetensi, dan profesionalisme guru yang antara lain dihasilkan oleh: penerapan sistem uji kompetensi guru; penilaian kinerja guru yang sah, andal, transparan dan berkesinambungan; peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi guru dengan mempertimbangkan perbaikan desain program dan keselarasan disiplin ilmu serta pengembangan profesional berkesinambungan bagi guru dalam jabatan. Guru sebagai tauladan bagi siswa dan masyarakat harus meminimalisasi angka ketidakhadiran di kelas dalam lima tahun ke depan.

Penguatan peran orang tua dicirikan antara lain dalam bentuk peningkatan partisipasi aktif mereka dalam proses pendidikan. Sejak awal, para orang tua diupayakan memahami beberapa aspek pendidikan, seperti kurikulum dan proses pengelolaan pendidikan. Mereka dilibatkan dalam sebagian pengambilan keputusan tentang pengelolaan yang penting. Penguatan peran aparatur institusi pendidikan antara lain dicirikan oleh perbaikan layanan birokrasi, kesesuaian regulasi, dan sinkronisasi yang optimal

dengan pelaku pendidikan lainnya. Aparatur institusi pendidikan diarahkan untuk tidak sekadar menjalankan tugas kerja, melainkan juga menjadi pendukung utama pembangunan pendidikan.

2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan Mendukung visi, tujuan strategis ini menegaskan fokus pembangunan kebudayaan adalah pemberdayaan pelaku budaya. Pemberdayaan bisa dikatakan sebagai awal dari penguatan peran mereka dalam melestarikan kebudayaan. Pencapaian tujuan strategis dimaksud dicirikan antara lain oleh meningkatnya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan.

Pemberdayaan pelaku budaya akan mendorong peningkatan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pelaku budaya dan masyarakat pendukung terhadap warisan budaya dan karya budaya. Secara bersamaan akan terjadi peningkatan mutu karya dan pelaku budaya serta peningkatan mutu layanan dalam pelestarian warisan budaya.

3. Peningkatan Akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus

Peningkatan akses pendidikan di semua jenjang dan dalam pendidikan masyarakat telah dilaksanakan selama ini di seluruh wilayah Indonesia. Upaya peningkatan lebih lanjut akan dilakukan, mengingat masih ada ketidakmerataan tingkat akses pendidikan antar provinsi, kabupaten dan kota. Perhatian lebih besar dibanding era sebelumnya akan diberikan pula

pada peningkatan akses pendidikan anak berkebutuhan khusus.

Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu ditingkatkan dalam lima tahun ke depan mengingat PAUD mempunyai peran penting dalam mendorong tumbuh kembang anak secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Fokus peningkatan akses PAUD terutama pada peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam PAUD dan pemberdayaan peran swasta dalam penyelenggaraan PAUD holistik integratif.

Meskipun upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun telah dilaksanakan dan tuntas bagi 66.15% dari keseluruhan kabupaten dan kota (340 dari 514 kabupaten dan kota), peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah untuk memenuhi program wajib belajar dua belas tahun merupakan agenda yang harus dipenuhi dalam lima tahun ke depan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015—2019. Seiring dengan hal ini, fokus peningkatan akses pendidikan dasar pada sebanyak 174 kabupaten dan kota (33.85%) untuk menyelesaikan program wajib belajar sembilan tahun.

Peningkatan jaminan bagi lulusan SMP/MTs untuk dapat melanjutkan ke pendidikan menengah merupakan fokus peningkatan akses pendidikan menengah. Solusi atas kendala biaya dan jarak atau keterjangkauan antara lain melalui pendirian sekolah menengah baru di setiap kecamatan yang dikombinasikan dengan penyediaan biaya operasional pendidikan serta bantuan khusus bagi siswa miskin dengan Kartu Indonesia Pintar

(KIP). Inovasi dalam penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi diperhatikan untuk mengakselerasi peningkatan akses pendidikan menengah. Fokus peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah dalam lima tahun kedepan juga menitikberatkan pada peningkatan akses bagi anak berkebutuhan khusus, pengembangan daerah 3T, dan memperhatikan aspek gender.

Peningkatan akses pendidikan masyarakat mencakup peningkatan kapasitas pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan kursus dan pelatihan serta pendidikan orang dewasa/keluarga. Peningkatan kapasitas pendidikan keaksaraan dilaksanakan melalui peningkatan keaksaraan dan ketrampilan tepat guna kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun. Pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Peningkatan akses pendidikan kursus dan pelatihan perlu diiringi dengan peningkatan mutu lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus yaitu dengan menerapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam lima tahun ke depan. Peningkatan kapasitas pendidikan keluarga difokuskan pada orang tua/wali bagi siswa PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

4. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pembelajaran yang Berorientasi pada Pembentukan Karakter

Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran pada semua jenjang

pendidikan dalam lima tahun ke depan difokuskan pada pembentukan karakter siswa, peserta pelatihan dan kursus, serta orang dewasa. Peningkatan mutu pendidikan anak usia dini merupakan salah satu kunci keberhasilan pendidikan pada jenjang selanjutnya, sehingga fokus peningkatan mutu PAUD pada lima tahun ke depan adalah peningkatan pemenuhan standar pelayanan PAUD.

Peningkatan mutu pembelajaran pendidikan dasar dan menengah didukung oleh semakin banyak pelibatan siswa di kelas secara interaktif, sehingga mendorong kreativitas siswa, daya kritis dalam berpikir dan kemampuan analisis. Ditargetkan adanya peningkatan hasil yang signifikan dalam hasil tes nasional dan hasil tes internasional. Sebagai contoh, hasil tes PISA siswa Indonesia meningkat dalam periode lima tahun ke depan. Di samping tes yang demikian itu, mengingat Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan, pembentukan karakter bagi siswa menjadi hal yang utama dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peningkatan mutu pada pendidikan dasar dan menengah berkaitan erat dengan pengembangan dan penerapan kurikulum secara baik. Evaluasi yang terus-menerus atas pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 diharapkan menghasilkan kurikulum yang lebih baik dan diterapkan secara baik. Contoh aspek yang mutlak diperhatikan dalam konteks ini adalah pendidikan karakter dan pendidikan kewargaan. Pendidikan karakter dimaksudkan untuk membina budi pekerti, membangun watak,

dan mengembangkan kepribadian peserta didik. Sementara itu, pendidikan kewargaan dimaksudkan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan di kalangan anak usia sekolah, sehingga terbentuk pemahaman mengenai pluralitas sosial dan keberagaman budaya dalam masyarakat, yang berdampak pada kesediaan untuk membangun harmoni sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keanekaragaman.

Peningkatan mutu dan kapasitas pendidikan masyarakat diantaranya meliputi pendidikan keaksaraan yang memberikan layanan peningkatan keaksaraan dan ketrampilan tepat guna kepada penduduk buta aksara usia 15-59 tahun. Pendidikan kesetaraan memberikan pengetahuan dan kompetensi setara dengan pendidikan dasar dan menengah. Kebutuhan akan manusia yang unggul dan berjiwa kompetitif semakin mendesak dengan diterapkannya komunitas ekonomi ASEAN atau ASEAN economic community yang akan membuka pintu masuknya produk negara-negara ASEAN termasuk tenaga kerja asing ke Indonesia. Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN harus tetap menjaga daya saingnya dan menjadi tuan rumah di negara sendiri.

Peningkatan mutu lembaga penyelenggara pelatihan dan kursus sangat diperlukan untuk menjamin mutu peserta pelatihan dan kursus dapat diterima oleh pasar kerja. Bahkan, dapat memotivasi bangkitnya para pengusaha muda. Pemerintah mendorong proses akreditasi dan penyelarasan penyelenggara/lembaga kursus dan pelatihan agar

mengacu pada standar penyelenggaraan serta mengadaptasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Penerapan KKNI dan SKNI pada lebih banyak lembaga kursus dengan diharapkan dapat dilaksanakan dalam 5 tahun kedepan, meskipun sebanyak 36 jenis kursus telah memiliki KKNI, penjaminan kepastian terhadap lembaga- lembaga kursus yang benar-benar telah menerapkan KKNI menjadi tantangan kedepan disamping tantangan lainnya berupa 44 jenis ketrampilan/kursus masih perlu disusun KKNI-nya serta kemampuan kemendikbud menerbitkan 3 SKKNI setiap tahunnya.

Peningkatan mutu pendidikan orang dewasa juga dilakukan dengan pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga berupaya memberikan wawasan, pemahaman dan keterampilan tentang kiat mendidik anak sejak janin sampai dewasa dalam hal memelihara cinta dan kasih sayang, pendidikan karakter, gizi dan kesehatan, menyiapkan pra keaksaraan, memenuhi hak dan perlindungan anak, mencegah perilaku destruktif, dan meningkatkan mutu hasil belajar anak melalui pendampingan yang menyeluruh.

5. Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan

Peningkatan upaya untuk melindungi, mengembangkan dan meningkatkan diplomasi kebudayaan bertujuan untuk meningkatkan apresiasi seni, karya budaya, memenuhi sarana/prasarana budaya, dan meningkatkan

kepedulian daerah dalam membangun kecintaan pada budaya. Pemerintah juga harus meningkatkan perlindungan terhadap kekayaan warisan budaya, memperbaiki basis data agar mudah mengelola seluruh warisan budaya, serta meningkatkan diplomasi budaya Indonesia ke dunia internasional agar warisan budaya yang dimiliki tidak hilang. Kebudayaan sebagai salah satu instrumen dalam peningkatan mutu pembelajaran dan jati diri bangsa yang merupakan aspek penting dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan dapat mempererat persatuan bangsa. Pemerintah memiliki kewajiban dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya.

Peningkatan upaya pengembangan dan pembinaan bahasa bertujuan untuk memacu gerakan standarisasi mutu bahasa, pemakaian dan pemakai bahasa guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan dan dibina melalui pendidikan Indonesia serta mendukung gerakan pembentukan mental peserta didik menjadi anak bangsa Indonesia yang berkepribadian, mandiri, dan berdaya saing kuat. Peran kemampuan berbahasa guru dan tendik merupakan aspek penting dalam upaya peningkatan mutu layanan dan lulusan, karena dengan kemampuan bahasa yang baik, ilmu pengetahuan dapat disampaikan dengan baik. Oleh karena itu, Uji Kompetensi Bahasa Indonesia (UKBI) sangat perlu untuk dijadikan prasarat dalam program sertifikasi dan peningkatan kinerja guru dan tendik.

Pemerintah juga harus meningkatkan peran bahasa Indonesia sebagai

bahasa perhubungan, terutama dalam penyelenggaraan pendidikan yang makin terbuka, di kawasan ASEAN. Untuk mewujudkan tujuan itu, dituangkan beberapa sasaran strategis, di antaranya adalah penyusunan kebijakan teknis; rencana dan program pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia; serta pelaksanaan dan penguatan tata kelola pengembangan dan pembinaan bahasa.

6. Peningkatan Sistem Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel dengan Melibatkan Publik

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian bertujuan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kemendikbud tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional. Selain itu konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan transparansi dengan

melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM ditujukan agar penyediaan sumber daya oleh pendidikan menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM pendidikan sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan pendidikan. Oleh karena itu Kemendikbud perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran pendidikan melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme BOS, Kartu Indonesia Pintar (KIP), anggaran pengembangan sarana prasarana melalui DAK akan diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan dan tidak semata-mata pada peningkatan akses pendidikan dasar dan menengah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kota Batam sebagai daerah perindustrian dan perdagangan yang berkelanjutan membutuhkan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien dalam mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat. Jika dilihat dari perspektif pendidikan, perkembangan kota Batam berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik yang memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi

yang berasal dari arus urbanisasi dan migrasi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah hinterland harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.4.1. Pola Ruang Wilayah

1. Pola ruang wilayah Kota Batam dikembangkan secara serasi, selaras dan terpadu dengan struktur ruang wilayah kota, mencakup kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan hidup di wilayah darat dan laut;
2. Mengembangkan ragam ruang terbuka hijau kota (hutan lindung, hutan kota, jalur hijau, taman median jalan, taman kota, taman lingkungan, bumi perkemahan, dan lain-lain) dalam rangka mewujudkan tutupan hijau minimal 30% dari luas wilayah darat kota, untuk meningkatkan fungsi lindung wilayah kota, peresapan air, pengaturan iklim mikro, dan estetika kota;
3. Mengembangkan kawasan budidaya sesuai kondisi, potensi, serta karakteristik sumberdaya alam dan lahan berdasarkan kriteria lokasi kegiatan dan standar teknik pemanfaatan ruang menurut ketentuan perundang-undangan;
4. Menciptakan keseimbangan perkembangan dan pemerataan

pembangunan antara wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang nantinya akan bertransformasi menjadi kawasan ekonomi khusus dengan pulau-pulau sekitar yang dapat dikembangkan juga sebagai kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, dan kawasan-kawasan prioritas atau melalui pendekatan kawasan ekonomi khusus (KEK);

5. Memanfaatkan secara optimal areal lahan yang diserahkan pengembang kepada pemerintah kota untuk meningkatkan fasilitas pelayanan umum dan bangunan pemerintah, secara serasi dan selaras dengan pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan dan ruang terbuka hijau kota;
6. Mengintensifkan pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan budidaya yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pulau Batam, pulau Rempang dan pulau-pulau yang lain dengan mengarahkan pembangunan secara vertical;
7. Mengendalikan kegiatan reklamasi di kawasan-kawasan pengembangan pantai untuk mengurangi tekanan dan tingkat kerusakan kawasan bukit dan perbukitan di pulau Batam, dan melakukan substitusi bahan timbun dengan pasir darat dan/atau pasir laut; dan
8. Mengembangkan pemanfaatan ruang di wilayah laut secara terpadu dengan wilayah darat dan pesisir untuk meningkatkan keserasian, keselarasan, dan untuk menghindarkan dampak negatif tak diinginkan terhadap lingkungan laut.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kawasan Batam dalam memenuhi kebutuhannya dan menanggapi keperluan lahan yang strategis dan sesuai digunakan sebagai kawasan budidaya melakukan reklamasi di beberapa bagian pulau di kawasan ini terutama pada pesisir bagian utara yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Reklamasi yang dilakukan digunakan sebagai peruntukkan kawasan industri dan galangan kapal. Reklamasi yang dilakukan pada kawasan ini termasuk dalam reklamasi dalam skala besar. Reklamasi yang dilakukan merubah ekosistem dan bioregion yang ada di kawasan ini. Dalam melaksanakan reklamasi perlu diperhatikan beberapa hal yang berpengaruh terhadap daya dukung lingkungan Kawasan BBK:

- **Aspek Fisik**, meliputi tata ruang, lahan, hidrologi dan jaringan drainase, hidro-eseanografi, muara sungai/ lidah pasir/ delta, geomorfologi, sarana dan prasarana sekitarnya, air tanah, material urugan;
- **Aspek Ekologi**, meliputi biota dan ekosistem perairan;
- **Aspek Hukum**, meliputi hukum adat dan hak atas tanah;
- **Aspek Sosial Ekonomi**, meliputi persepsi masyarakat, konsultasi publik, aktivitas ekonomi, demografi, peranan masyarakat, kearifan lokal, cagar budaya, dan situs sejarah;
- **Aspek Pendukung Lainnya**, meliputi pariwisata bahari, perhubungan laut, aksesibilitas lokasi, fasilitas umum.

Sumber Daya Air

Air Permukaan

Dalam pemenuhan sumber daya air dilakukan pembangunan waduk-waduk baru. Pembangunan waduk baru, didahului dengan kajian neraca air dalam satuan wilayah DAS/Sub DAS. Kajian ini telah dilakukan dalam penyusunan rencana tata ruang Kawasan Batam, Bintan dan Karimun. Rencana sistem jaringan sumber daya air pada kawasan ini didasarkan pada neraca air di Kota Batam dan sekitarnya.

Air Tanah

Kajian yang telah dilakukan lebih difokuskan pada potensi air tanah yang ada di kawasan Kota Batam berdasarkan batuan dan bentuk permukaan kawasan. Dalam melihat daya dukung air tanah pada kawasan ini, khususnya yang terkait dengan keseimbangan pemenuhan dan ketersediaan air tanah diperlukan kajian berupa penyelidikan hidrogeologi yang lebih rinci, untuk mengetahui konfigurasi lapisan akuifer agar bisa menghasilkan kesimpulan dan penanganan yang lebih rinci.

Tabel 3.1 Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Batam
Quick Appraisal

No	Isu Lingkungan Strategis	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
1.	Alih fungsi lahan konservasi TGHK menjadi kawasan budidaya			1. Mengubah ekosistem 2. Mengancam keaneka-ragaman hayati 3. Mengancam keterse-diaan	1. Mempertahankan keaneka-ragaman hayati yang ada 2. Mempertahankan kawasan resapan air	1. Perlu adanya kajian komprehensif termasuk kajian tata lingkungan 2. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kemampuan wila-yah

No	Isu Lingkungan	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
				sumber daya air		
2.	Alih fungsi kawasan hutan bakau dan sempadan sungai			<ol style="list-style-type: none"> 1. Dapat terjadi abrasi pantai dan sedimentasi sungai 2. Mengubah ekosistem 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengembalikan fungsi kawasan hutan bakau dengan melakukan penanaman kembali 4. Perluasan areal hutan pada kawasan yang dinilai tidak produktif dan memiliki daya dukung tanah yang rendah untuk dilakukan pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan kawasan perluasan kegiatan pada kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat 2. Pembuatan tanggul untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat adanya gelombang pasang 3. Peningkatan kegiatan Perikanan di lokasi sempadan pantai 4. Budidaya terumbu karang
3.	Reklamasi pantai skala besar		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi tekanan atas kebutuhan lahan 2. Menghimpun transportasi air 3. Membuka peluang pembangunan tinggi 4. Meningkatkan pendapatan daerah 5. Kualitas rumah dan lingkungan meningkat 6. Lokasi strategis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konflik sosial 2. Lahan tangkapan nelayan berkurang, menjadikan wilayah tangkapan lebih jauh dan ruang tambatan perahu berkurang 3. Pendapatan nelayan cenderung menurun 4. Perubahan fungsi bangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanam kembali pohon bakau untuk memperbaiki ekosistem pantai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperhatikan pembangunan prasarana dan sarana agar tidak mengganggu aliran air/saluran drainase yang ada 2. Meminimalkan <i>cut and fill</i> 3. Perlu adanya kajian komprehensif termasuk kajian tata lingkungan 4. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan kemampuan wilayah
4.	Pengusahaan kawasan lindung untuk		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan perekonomian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengubah ekosistem setempat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan jalur hijau dan saluran drainase di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembatasan ijin penggunaan air tanah untuk pemanfaatan selain air minum

No	Isu Lingkungan	Subtansi RTRW	Pengaruh		Alternatif Mitigasi	Rekomendasi
			Positif	Negatif		
	ka-wasan budaya (per-tambangan, industri, perdagangan dan ja-sa		meningkat 2. Peningkatan pendapatan perkapita daerah dan penduduk 3. Lokasi strategis	2. Mengancam keanekaragaman hayati	kan-an kiri jalan 2. Mempertahankan keaneka-ragaman hayati yang ada	
5.	Terbatasnya sumber air baku			1. Kebutuhan air bersih penduduk Kota Batam kurang tercukupi	1. Mempertahankan dan me-lindungi kawasan resapan air 2. Mengembangkan RTH di se-kitar mata air 3. Melindungi dan memelihara sumber-sumber air dari pen-cemaran	
6.	Terbatasnya kapa-sitas supply air minum dari PDAM Batam			1. Kebutuhan air minum penduduk Kota Batam kurang tercukupi	1. Mempertahankan dan me-lindungi kawasan resapan air 2. Mengembangkan RTH di se-kitar mata air 3. Melindungi dan memelihara sumber-sumber air dari pen-cemaran	

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Secara umum isu-isu strategis yang menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Kota Batam dan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Batam Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Urusan/Indikator	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
I.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT		

No.	Urusan/Indikator	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			
1.	Pendidikan	<p>Angka melek huruf di Kota Batam belum mencapai sasaran nasional (100%), hal ini dikarenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum meratanya keberadaan sekolah terutama di daerah pesisir (terpencil) 2. Terbatasnya jumlah guru 3. Minimnya kesadaran masyarakat daerah pesisir terhadap pentingnya pendidikan 4. Masalah Usia Lanjut 5. Sosial Budaya Masyarakat (paradigma masyarakat yang mengutamakan anaknya untuk bekerja sebagai nelayan/petani dibandingkan bersekolah) 6. Minimnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi kehidupan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dibentuknya UPTD Cabang Dinas pada seluruh kecamatan pesisir untuk memperpendek rentang kendali sekolah di daerah pesisir 2. Dilakukan sekolah pola lokal/kelas jauh 3. Guru-guru dan Kepala Sekolah yang ada di daerah pesisir melakukan jemput bola door to door untuk mengajak anak-anak usia sekolah agar dapat bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya 4. Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam membentuk Sanggar Kegiatan Belajar untuk memfasilitasi masyarakat tidak mampu 5. Pemerintah Kota Batam melalui UPTD-UPTD di Kecamatan Pesisir melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah pesisir
		<p>Angka rata-rata lama sekolah di Kota Batam belum mencapai sasaran Kemendikbud, hal ini karena :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosial Budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Mutu Guru 2. Kualifikasi Penerimaan Guru 3. Pembangunan RKB 4. Pembangunan Perpustakaan

No.	Urusan/Indikator	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>Masyarakat (paradigma masyarakat yang mengutamakan anaknya untuk bekerja sebagai nelayan/petani dibandingkan bersekolah)</p> <p>2. Minimnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi kehidupan</p> <p>3. Kinerja Mutu Satuan Pendidikan masih rendah, terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> • % Guru Layak (<i>guru kurang mampu melakoni perannya selaku pendidik di daerah pesisir</i>) • % RKB (<i>biaya pembangunan RKB lebih besar dibandingkan biaya pembangunan di daerah mainland</i>)% Perpustakaan (minimnya jumlah perpustakaan dan ketersediaan buku pengayaan) 	
		<p>APK SMA/SMK/MA Paket C di Kota Batam masih rendah, hal ini dikarenakan :</p>	<p>1. Pembangunan GSB/USB</p> <p>2. Pembangunan RKB</p> <p>3. Melakukan rehabilitasi ringan</p>

No.	Urusan/Indikator	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan Ruang Kelas tidak sesuai dengan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Usia Sekolah (1 : 45) 2. Tingginya tingkat trend pendidikan dimasyarakat yang selalu mengedepankan sekolah negeri daripada sekolah swasta sehingga tingkat kekurangan ruang sangat tinggi di sekolah negeri. 3. Minimnya jumlah lahan yang memenuhi syarat untuk pembangunan sekolah terutama dari luasan minimal 	<p>dan berat sarana dan prasarana</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melakukan revitalisasi bangunan gedung lama termasuk sarana penunjang yang telah dihapuskan untuk meningkatkan kemampuan daya tampung 5. Perlunya dilakukan koordinasi yang baik antara kewenangan BP Kawasan dan Pemerintah Kota Batam
II	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB		
1.	Pendidikan	<p>Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD di Kota Batam masih rendah, hal ini dikarenakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Ketersediaan Gedung Sekolah Terhadap Pertumbuhan Jumlah Penduduk Usia Sekolah 2. Tingginya tingkat trend pendidikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan GSB/USB 2. Pembangunan RKB 3. Melakukan perubahan paradigma di masyarakat terkait peranan sekolah swasta terhadap pendidikan di Kota Batam

No.	Urusan/Indikator	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>dimasyarakat yang selalu mengedepankan sekolah negeri daripada sekolah swasta sehingga tingkat kekurangan ruang sangat tinggi di sekolah negeri.</p> <p>3. Tingkat ketimpangan biaya pendidikan/sekolah antara sekolah negeri dan swasta yang cukup tinggi</p>	
		<p>Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah SMP di Kota Batam masih rendah, hal ini dikarenakan :</p> <p>1. Faktor Ketersediaan Gedung Sekolah Terhadap Pertumbuhan Jumlah Penduduk Usia Sekolah</p> <p>2. Tingginya tingkat trend pendidikan dimasyarakat yang selalu mengedepankan sekolah negeri daripada sekolah swasta sehingga tingkat kekurangan ruang sangat tinggi di sekolah negeri.</p> <p>3. Tingkat ketimpangan</p>	<p>1. Pembangunan GSB/USB</p> <p>2. Pembangunan RKB</p> <p>3. Melakukan perubahan paradigma di masyarakat terkait peranan sekolah swasta terhadap pendidikan di Kota Batam</p>

No.	Urusan/Indikator	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		biaya pendidikan/sekolah antara sekolah negeri dan swasta yang cukup tinggi	
		Rasio guru/murid SD di Kota Batam masih rendah, hal ini dikarenakan : 1. Kekurangan tenaga pendidik, karena terbatasnya penerimaan guru PNS/non PNS namun terdapat peningkatan jumlah rombel di sekolah. 2. Meningkatnya jumlah siswa baik yang berasal dari Kota Batam maupun dari luar Kota Batam.	1. Penerimaan guru PNS
		Rasio guru SD-SMP/murid SD-SMP per kelas rata-rata masih rendah, hal ini dikarenakan : 1. Kekurangan tenaga pendidik, karena terbatasnya penerimaan guru PNS	1. Penerimaan guru PNS
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik di Kota Batam masih rendah, hal ini dikarenakan : 1. Jumlah Fasilitas Pendidikan Kurang	1. Rehab ringan maupun berat oleh Dinas Pendidikan 2. Pembangunan RKB 3. Perlu dilakukan intervensi dalam bentuk anggaran (insentif) dalam penyediaan

No.	Urusan/Indikator	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		<p>Sehingga Penggunaan Ruang Melebihi Kapasitas / Jumlah Murid melebihi kapasitas sekolah</p> <p>2. Kemampuan swasta yang rendah dalam melakukan perbaikan sarana dan prasarana yang dimiliki karena terbatasnya kemampuan anggaran</p>	<p>sarana dan prasarana yang layak</p>
		<p>Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Batam masih rendah, hal ini dikarenakan :</p> <p>1. Jumlah Fasilitas Pendidikan Kurang Sehingga Penggunaan Ruang Melebihi Kapasitas / Jumlah Murid melebihi kapasitas sekolah</p>	<p>1. Rehab ringan maupun berat oleh Dinas Pendidikan</p> <p>2. Pembangunan RKB</p>
		<p>Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kota Batam masih rendah, hal ini dikarenakan :</p> <p>1. Masalah keterbatasan ekonomi keluarga siswa</p>	<p>1. Program beasiswa dan jaminan sosial pengentasan kemiskinan</p> <p>2. Sosialisasi bantuan pendidikan</p>
		<p>Ketersediaan pasokan listrik dan air bersih belum mencukupi untuk mencakup pertumbuhan rumah tangga</p>	<p>1. Adanya pasokan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan rumah tangga baru</p>

No.	Urusan/Indikator	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
		baru	2. Adanya pasokan air bersih yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan rumah tangga baru

4.1 Visi Dinas Pendidikan

Dengan terbitnya Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2016 – 2021, maka Dinas Pendidikan Kota Batam menerjemahkan visi dan misi Walikota Batam ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kota Batam menjadi visi organisasi yang tetap mengacu pada visi Kepala Daerah Kota Batam, yakni **“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”** menjadi visi Organisasi Perangkat Daerah yaitu :

**“TERWUJUDNYA SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERTAQWA,
BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING,**

Visi tersebut merupakan pengejawantahan visi Walikota Batam dan tertuang di dalam dokumen RPJMD Kota Batam Tahun 2016 – 2021 yang ditekankan pada rencana pencapaian misi kedua yang menyatakan bahwa **“Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera”**. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas, siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih mandiri dan berbudaya.

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Sumber Daya Manusia : Merupakan salah satu modal utama dalam pelaksanaan pembangunan baik sebagai subyek maupun sebagai obyek. Dalam hal ini memberikan penjelasan yang sangat utama dalam pembangunan yang menjadi sasaran utama Dinas Pendidikan adalah membangun dan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menopang pembangunan di Kota Batam.

Bertaqwa : Mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam tetap mengutamakan akhlak untuk mewujudkan masyarakat yang madani. Pembangunan karakter menjadi sasaran utama untuk menciptakan generasi cerdas dan berakhlak mulia.

Berbudaya :Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat yang sopan, santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan. Bahwa pembangunan SDM berkualitas tetaplah dengan menciptakan manusia yang mampu menjunjung tinggi dengan menghormati adat istiadat dan budaya lokal dalam hal ini budaya melayu dan tetap menghormati adanya perbedaan suku dan budaya yang ada di Kota Batam sehingga mampu menciptakan kedamaian yang religius.

Berdaya Saing:Mengarahkan masyarakatKota Batam untuk mampu melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.

Menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi :Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan.Penguasaan teknologi menjadi salah satu sasaran agar SDM yang ada dan dihasilkan adalah SDM yang berkualitas, berkarakter dan selalu mampu memanfaatkan teknologi bagi pembangunan di Kota Batam dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkualitas di Kota Batam sebagaimana tertuang di dalam visi kepala daerah.

4.2 Misi Dinas Pendidikan

Dalam upaya pencapaian visi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk dokumen RPJMD, maka selanjutnya Dinas Pendidikan membuat dokumen Renstradengan mencantumkan visi yang memiliki benang merah dari visi dan misi kepala daerah. Setelah visi tersebut ditetapkan selanjutnya disusun misi untuk mewujudkan visi Dinas Pendidikan tersebut.

Misi Dinas Pendidikan Kota Batam terdiri dari :

1. Mencerdaskan Sumber Daya Manusia yang kreatif , inovatif , dan Kompetitif;

2. Meningkatkan pelayanan akses pendidikan yang bermutu dan merata;
3. Meningkatkan Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan yang berintegritas;
4. Meningkatkan Kesetaraan layanan pendidikan dalam keterlibatan pelaku pendidikan;
5. Mewujudkan penguatan tatakelola yang dinamis, kreatif, inovatif dan Akuntabel;

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

Sesuai dengan dokumen RPJMD, maka tujuan yang ingin diwujudkan dalam pembangunan bidang pendidikan adalah **Mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, merata, terbuka, terjangkau dan agamis dan bertaqwa**. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan melalui Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan

TUJUAN DAN SARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
T 1	Kualitas Pendidikan	Peringkat Hasil Ujian Sekolah SD Se Provinsi Kepulauan Riau	1	1	1	1	1	1
		Peringkat Ujian Nasional SMP Se Provinsi Kepulauan Riau	2	2	1	1	1	1

S1	Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini		APK PAUD	77,6	79,2 6	80,44	82,22	84,69	86,22	
	S.1.1	Meningkatkan Minat Orang tua untuk mendaftarkan anak ke lembaga PAUD		Meningkatnya Persentase anak yang mendaftar ke lembaga PAUD	18,01	18,5 2	19,06	19,59	20,13	20,59
		S.1.1.1	Sosialisasi Pendidikan PAUD melalui Pembinaan pendidikan anak usia dini terintegrasi	Terlaksananya sosialisasi minat orang tua mendaftarkan anak ke lembaga PAUD (12 Kecamatan)	100	100	100	100	100	100
	S.1.2	Ketersediaan Sarana Pendidikan PAUD		Jumlah peningkatan daya tampung TK pada satuan pendidikan negeri	1164	1164	1164	1164	1164	1304
		S.1.2.1	Terbangunnya GSB TK	Jumlah GSB TKN yang dibangun	0	0	0	0	1	1
		S.1.2.1	Terbangunnya RKB TK	Jumlah RKB TKN yang dibangun	2	0	0	4	6	6
	S2	Mutu Layanan Pendidikan		Persentase sekolah berakreditasi minimal B						
		PAUD	36,46	41,3 5	45,00	48,00	53,00	60,00		
		SD	53,58	56,0 0	61,00	64,00	67,00	70,00		
		SMP	64,59	67,0 0	69,00	71,00	74,00	78,00		
S.2.1		Pembinaan dan Pengembangan PAUD		Jumlah lembaga PAUD	493	529	530	531	532	533
		S.2.1.1	Penyusunan dan Pengembangan	Persentase guru yang mengikuti pelatihan K 13	78,40	80,2 0	83,00	86,00	92,00	100

		n kurikulum PAUD							
	S.2.1.2	Kondisi layak guna Sarana dan prasarana PAUD	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi baik	71,26	74,60	77,00	80,00	82,00	84,00
	S.2.1.3	Peningkatan kecakapan motorik peserta didik PAUD	Persentase peserta didik yang mengikuti kegiatan kreasi anak PAUD	80,00	83,00	87,00	90,00	93,00	95,00
	S.2.1.4	Bangunan PAUD yang laik guna	Sekolah PAUD Bangunan Kondisi Baik	94.44	96.06	97.98	95.55	95.79	96.15
S.2.2	Peningkatan status rapor mutu SD		Jumlah sekolah menuju kategori minimal SNP 3	279	281	286	291	296	301
	S.2.2.1	Penyusunan dan Pengembangan kurikulum SD	Persentase guru yang mengikuti pelatihan K 13 Pelaksanaan ujian sekolah SD	58,60 ada	62,40 ada	68,50 ada	82,50 ada	90,00 ada	100 ada
	S.2.2.2	Peningkatan kualitas lulusan SD	Rata-rata nilai Ujian Sekolah SD Angka Putus Sekolah SD	69,12. 0.075	69,50 0,021	70,00 0,019	70,50 0	71,00 0	71,50 0
	S.2.2.3	Bangunan SD laik guna	Sekolah pendidikan SD bangunan kondisi baik	93.14	93.82	93.79	95.22	95.38	95.9
	S.2.2.4	Kondisi laik guna Sarana dan prasarana SD	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi baik	60,20	64,00	70,00	72,00	74,00	76,00

	S.2.2.5	Peningkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik Siswa SD	Jumlah perolehan prestasi akademik minimal tingkat provinsi	2	2	3	3	3	3
			Jumlah perolehan prestasi non akademik minimal tingkat provinsi (dari 28 nomor lomba)	22	23	24	24	25	26
S.2.3	Perluasan Akses Pendidikan Dasar SD		APK SD/MI/Paket A	103,47	104,2	104,62	104,8	105,1	105,61
			APM SD/MI/Paket A	92	93	93,46	93,8	94,88	95,09
	S.2.3.1	Terbangunnya a GSB SD	Jumlah GSB SDN yang dibangun	0	0	0	2	2	2
	S.2.3.2	Terbangunnya a RKB SD	Jumlah RKB SDN yang dibangun	24	33	50	45	50	50
S.2.4	Peningkatan status rapor mutu SMP		Jumlah sekolah menuju kategori minimal SNP 3	116	119	124	129	133	137
	S.2.4.1	Penyusunan dan Pengembangan kurikulum SMP	Persentase guru yang telah mengikuti pelatihan K 13	62,83	72,70	78,50	84,80	93,00.	100
			Pelaksanaan Ujian Nasional SMP	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	S.2.4.2	Peningkatan kualitas lulusan SMP	Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP	55,24	55,74	56,00	56,25	56,50	56,80
			Angka Putus Sekolah SMP	1.51	0.054	0.05	0	0	0
	S.2.4.3	Bangunan SMP laik guna	Sekolah pendidikan SMP bangunan kondisi baik	92.49	92.22	93.79	94.72	94.98	95.23
	S.2.4.4	Kondisi layak guna Sarana	Persentase sekolah memiliki sarana dan	60,20	60,60	70,00	71,30	72,50	75,00

		dan prasarana SMP	prasarana kondisi baik							
	S.2.4.5	Peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa SMP	Jumlah perolehan prestasi akedemik minimal tingkat provinsi	2	2	3	3	3	3	3
			Jumlah perolehan prestasi non akedemik minimal tingkat provinsi (dari 28 nomor lomba)	28	28	28	28	28	28	28
S.2.5	Perluasan Akses Pendidikan Dasar SMP		APK SMP/MTs/Paket B	102,45	105,5	105,81	106,15	106,84	107,01	
			APM SMP/MTs/PAket B	90,25	90,50	91,08	91,92	92,4	93,07	
	S.2.5.1	Terbangunnya GSB SMP	Jumlah GSB SMPN yang dibangun	0	0	2	2	2	2	2
	S.2.5.2	Terbangunnya RKB SMP	Jumlah RKB SMPN yang dibangun	10	30	35	35	40	40	40
S.2.6	Mutu tenaga pendidik dan kependidikan PAUD, SD dan SMP		Persentase Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD, SD dan SMP berstandar SKM	18,83	20,25	21,30	22,72	24,19	25,65	
			Persentase Meningkatnya Kepala sekolah negeri yang memiliki sertifikat kepala sekolah	86,04	86,04	88,37	90,70	93,02	95,35	
	S.2.6.1	Peningkatan Guru PAUD bersertifikasi	Persentase Guru PAUD bersertifikasi pendidik	10,12	11,18	11,85	12,86	13,86	14,86	
	S.2.6.2	Peningkatan Guru SD bersertifikasi	Persentase Guru SD bersertifikasi pendidik	19,48	21,24	22,28	23,86	25,44	27,01	
	S.2.6.3	Peningkatan Guru SMP bersertifikasi	Persentase Guru SMP bersertifikasi pendidik	21,51	23,65	24,92	26,82	28,76	30,67	
	S.2.6.4	Peningkatan mutu guru kelas	Jumlah Guru SD yang mengikuti pelatihan	198	298	398	500	600	700	

		SD	guru kelas						
	S.2.6.5	Peningkatan mutu guru mata pelajaran SMP	Jumlah Guru SMP yang mengikuti pelatihan keahlian di bidang yang di ampu	128	230	330	440	550	650
	S.2.6.6	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah TK	Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial	0	0	0	10	20	30
	S.2.6.7	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah SD	Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial	31	31	31	51	71	90
	S.2.6.8	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah SMP	Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial	19	19	19	39	59	80
	S.2.6.9	Pembinaan Calon Kepala sekolah	Jumlah Guru yang memiliki sertifikat kepala sekolah	16	46	46	46	76	76
	S.2.64.1 0	Peningkatan mutu Tenaga Kependidikan	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan keahlian	150	150	150	150	150	150
	S.2.7	Mutu pengawas sekolah	Jumlah Pengawas yang memiliki sertifikat pengawas dan penilik sekolah	70	70	100	100	100	100
	S.2.7.1	Peningkatan Pengawas dan Penilik Sekolah yang bersertifikasi	Jumlah yang mengikuti diklat calon pengawas/ peningkatan Kompetensi Pengawas	0	41	34	38	41	41
	5.2.8	Publikasi dan Informasi Pendidikan Kota Batam	Tersedianya data informasi pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	5.2.8.1	Penyusunan Data dan Informasi	Tersedianya data pendidikan yang valid	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

			Pendidikan Kota Batam							
S3	Penguatan tatakelola pelayanan pendidikan		Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisien	100	100	100	100	100	100	100
	S.3.1	Ketatalaksanaan pelayanan pendidikan daerah hinterland		Jumlah sekolah hinterland yang terlayani	66	66	66	66	66	66
		S.3.1.1	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Belakang padang	Jumlah sekolah yang terlayani	20	20	20	20	20	20
		S.3.1.2	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Bulang	Jumlah sekolah yang terlayani	15	15	15	15	15	15
		S.3.1.3	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Galang	Jumlah sekolah yang terlayani	31	31	31	31	31	31
	S.3.2	Tata kelola perencanaan dan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan keuangan yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100
		S.3.2.1	Peningkatan kualitas perencanaan program	Persentase dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu	100	100	100	100	100	100
		S.3.2.2	Peningkatan kualitas pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan	Persentase dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang selesai tepat waktu	100	100	100	100	100	100
		S.3.2.3	Tata kelola keuangan dan aset yang	Persentase capaian pengelolaan realisasi keuangan tepat waktu	100	100	100	100	100	100

			efektif, efisien dan akuntabel	sesuai dengan anggaran						
				Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/ eksternal yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100
	S.3.3	Tata kelola administrasi dan kepegawaian pada kantor dinas pendidikan		Persentase pelayanan administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100
				Persentase pengelolaan kepegawaian yang terlayani	100	100	100	100	100	100
		S.3.3.1	Kenaikan pangkat dan penghargaan	Persentase kenaikan pangkat dan penghargaan aparatur	100	100	100	100	100	100
		S.3.3.2	Disiplin aparatur	Persentase kehadiran tepat waktu aparatur kantor dinas pendidikan	100	100	100	100	100	98,00
		S.3.3.3	Pembinaan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	50	50	50	50	50	50
		S.3.3.4	Tindak Lanjut Administrasi Perkantoran	Persentase surat masuk yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100
S4	Peningkatan Kualitas Masyarakat Melalui Bantuan Pendidikan			Tersedianya bantuan pendidikan yang efektif kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100
	S.4.1	Bantuan Pendidikan Yang Efektif		Terlaksananya penyerahan bantuan pendidikan kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100
		S.4.1.1	Sumber daya manusia kota batam yang kompeten dan berdaya saing	Jumlah masyarakat yang menerima beasiswa melalui jalur undangan di lima universitas negeri teratas	60	65	70	75	80	90
		S.4.1.2	Peserta didik batam yang kompeten dan	Jumlah peserta didik yang menerima beasiswa prestasi	600	600	600	600	600	600

				berdaya saing	akademik di sekolah						
--	--	--	--	---------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

4.4 Strategi dan Kebijakan Dinas Pendidikan

Dari isu-isu strategis yang ada pada bab sebelumnya, maka strategi umum yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam adalah **“Menyelenggarakan Pendidikan Dasar yang terjangkau dengan menekankan pentingnya dalam melanjutkan ke pendidikan menengah serta peningkatan bantuan pendidikan kepada masyarakat”**.

Strategi itu dipilih berdasarkan isu-isu strategis yang pada umumnya mengarah kepada 3 (tiga) hal pokok mendasar dalam pembangunan pendidikan, yakni akses masyarakat dalam memperoleh pendidikan, Mutu tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan, dan tata kelola pendidikan. Tiga hal tersebut juga menjadi hal yang mendasar pada rencana strategis kementerian pendidikan dan kebudayaan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2016.

Misi Pemerintah Kota Batam yang tertuang di dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 dan menjadi konsentrasi bagi Dinas Pendidikan Kota Batam adalah pada misi kedua yang menyatakan **“Meningkatkan pelayanan akses pendidikan yang bermutu dan merata”**.

Menjawab strategi tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan rencana kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pendidikan Kota Batam sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam rangka wajib belajar 12 tahun serta layanan pendidikan anak usia dini;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan guru, tenaga kependidikan dan pengawas sekolah;
3. Memberikan Bantuan Pendidikan dalam bentuk beasiswa dan bentuk bantuan pendidikan lainnya bagi peningkatan sumber daya masyarakat;

Dalam upaya mencapai visi dan misi, maka telah ditetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam dokumen rencana strategis perangkat daerah. Namun untuk mencapai hal-hal tersebut, maka perlu disusun beberapa program dan kegiatan serta menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian program oleh perangkat Daerah. Pelaksanaan program kegiatan tersebut harus tepat sasaran baik dari sisi kelompok sasaran (subyek) maupun jumlah anggaran yang dibutuhkan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.

Program yang telah ditetapkan perangkat daerah untuk pencapaian visi dan misi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
2. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Pendidikan;
4. Program Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif.

Penetapan program mengacu pada strategi dan kebijakan yang diambil dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Visi dan misi perangkat daerah ini pada akhirnya menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Berikut adalah tabulasi Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu ditunjang dengan indikator rencana strategis agar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lebih fokus. Indikator capaian bidang pendidikan antara lain :

Tabel 5.1
Indikator Capaian Bidang Pendidikan

No	Program	Indikator Program
1.	Perluasan Akses Pendidikan Dasar	a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD b. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP d. Angka Partisipasi Murni (APM) SD e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP
2.	Mutu Layanan Pendidikan	Persentase Sekolah SD Berakreditasi Minimal B a. PAUD b. SD c. SMP
3.	Penguatan Tata kelola Pelayanan Pendidikan	Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisien
4.	Kualitas Sumber Daya Masyarakat	Persentase tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat
5.	Peran Serta Masyarakat Terhadap Pendidikan	Meningkatnya peran serta masyarakat

Penetapan indikator tersebut pada akhirnya menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Pendidikan Kota Batam di dalam menterjemahkan RPJMD dan melaksanakan rencana yang telah digariskan berikut target yang telah ditetapkan. Penetapan indikator tersebut menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kota Batam setiap tahunnya.

Untuk dapat mencapai indikator tersebut, maka Dinas Pendidikan Kota Batam harus menyusun kegiatan penunjang agar indikator tersebut dapat diraih. Untuk masing-masing kegiatan perlu dilengkapi dengan rencana indikator output kegiatan yang dapat menunjang indikator. Seluruh kegiatan tersebut pada akhirnya bertujuan pada upaya pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai indikator kinerja utama antara lain :

1. Meningkatnya angka APK PAUD;
2. Meningkatnya angka APK/APM SD;
3. Meningkatnya angka APK/APM SMP;
4. Meningkatnya Persentase Sekolah SD Berakreditasi Minimal B;
5. Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisien;
6. Tersedianya Bantuan Pendidikan yang Efektif kepada masyarakat;
7. Meningkatnya peran serta masyarakat.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASA

Program yang tercantum dalam RPJMD Kota Batam adalah merupakan program Kota Batam. sedangkan fungsi dibuatnya Renstra SKPD Dinas Pendidikan Kota Batam adalah merupakan penjabaran RPJMD Dinas Pendidikan Kota Batam yang mengacu pada RPJMD Kota Batam 2016 – 2021 dengan menyesuaikan program Kota Batam berdasarkan kepentingan. tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2016 – 2021 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan. sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Dengan demikian maka Renstra Dinas Pendidikan Kota Batam menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Pendidikan Kota Batam. serta implementasi terkait menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri perlu dilakukan penataan terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran mencakup kegiatan penyusunan standar Operasi dan Prosedur (SOP) dalam penyusunan. sosialisasi. dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang ditungkan dalam Renstra. dengan disusunnya Renstra SKPD juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja serta penyusunan LAKIP SKPD.

Kami sangat menyadari (Renstra-SKPD) Dinas Pendidikan Kota Batam tahun 2016-2021 ini masih memerlukan perbaikan untuk kesempurnaan pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan Kota Batam. Akhirnya. masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami nantikan agar (Renstra-SKPD) ini dapat memenuhi harapan masyarakat dalam upaya untuk memajukan pembangunan bidang Pendidikan Kota Batam khususnya.

Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Satuan	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	APK SD	Persentase	103,47	104,2	104,5	105	105,5	106	106
2	APM SD	Persentase	92	93	94	95	96	97	97
3	APK SMP	Persentase	102,45	105,5	106	106,5	107	107,5	107,5
4	APM SMP	Persentase	82	83	84	85	86	87	87
5	Persentase SD Berakreditasi Minimal A	Persentase	32,36	33,00	34,00	35,00	36,00	37,00	37,00
6	Persentase SD Berakreditasi Minimal B	Persentase	21,22	23,00	27,00	29,00	31,00	33,00	33,00
7	Persentase SMP Berakreditasi Minimal A	Persentase	40,99	42,00	43,00	44,00	45,00	46,00	46,00
8	Persentase SMP Berakreditasi Minimal B	Persentase	23,60	25,00	26,00	27,00	29,00	32,00	32,00
9	Persentase sarana pendidikan kondisi bangunan baik SDN	Persentase	35,00	39,67	44,00	49,00	54,00	59,00	59,00
10	Persentase sarana pendidikan kondisi bangunan baik SMPN	Persentase	37,89	45,47	51,00	57,00	63,00	70,00	70,00
11	Angka Putus Sekolah SD	Persentase	0.021	0.019	0.015	0	0	0	0
12	Angka Putus Sekolah SMP	Persentase	0.054	0.050	0.045	0.035	0.025	0.015	0,015
13	% Tingkat Kelulusan SD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
14	% Tingkat Kelulusan SMP	Persentase	100	100	100	100	100	100	100
15	APK PAUD	Persentase	27	28	30	32	35	40	40
16	Persentase TK Berakreditasi Minimal A	Persentase	16,00	20,00	35,00	45,00	60,00	75,00	75,00
17	Persentase TK Berakreditasi Minimal B	Persentase	20,00	35,00	49,00	60,00	75,00	89,00	89,00

18	Jumlah Lembaga kursus dan pelatihan yang menerapkan KKNI	Lembaga	1	1	1	1	1	1	1
19	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan keluarga	Persentase	5	5	8	10	12	15	15
20	Persentase Kepala Sekolah yang bersertifikat kepala sekolah	Persentase	7,80	8,50	9,00	10,00	12,50	15,00	15,00
21	Persentase Pengawas yang bersertifikat Pengawas	Persentase	80	85,30	88	90	95	98	98
22	Persentase guru yang mampu mencapai standar kompetensi minimum (SKM) Nasional, yaitu sekurang-kurangnya :	Persentase	-	-	-	-	-	-	-
	1. TK	Persentase	7,00	8,05	9,0	9,3	9,6	10,0	10,0
	2. SD	Persentase	17,00	18,49	19,00	19,60	20,00	20,40	20,40
	3. SMP	Persentase	17,00	18,63	19,00	19,80	20,60	21,00	21,00
23	Menurunnya persentase angka kenakalan siswa pada satuan pendidikan	Persentase	-	-	-	5	5	5	5
24	Jumlah masyarakat yang lulus undangan masuk 5 PTN yang dibiayai Pemerintah Kota Batam	Jumlah orang	60	60	65	70	75	80	410

DITETAPKAN DI : Batam
PADA TANGGAL : 30 Januari 2017
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM**

MUSLIM BIDIN
Pembina Utama Muda
NIP.19580412 198703 1 011

TUJUAN DAN SARAN			INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
T1	Kualitas Pendidikan		Peringkat Hasil Ujian Sekolah SD Se Provinsi Kepulauan Riau	1	1	1	1	1	1	
			Peringkat Ujian Nasional SMP Se Provinsi Kepulauan Riau	2	2	1	1	1	1	
S1	Perluasan Akses Pendidikan Anak Usia Dini		APK PAUD	27	28	30	32	35	40	
	S.1.1	Meningkatkan Minat Orang tua untuk mendaftarkan anak ke lembaga PAUD		Meningkatnya Persentase anak yang mendaftarkan ke lembaga PAUD	18,01	18,52	19,06	19,59	20,13	20,59
		S.1.1.1	Sosialisasi Pendidikan PAUD melalui Pembinaan pendidikan anak usia dini terintegrasi	Terlaksananya sosialisasi minat orang tua mendaftarkan anak ke lembaga PAUD (12 Kecamatan)	100	100	100	100	100	100
	S.1.2	Ketersediaan Sarana Pendidikan PAUD		Jumlah peningkatan daya tampung TK pada satuan pendidikan negeri	1164	1164	1164	1164	1164	1304
		S.1.2.1	Terbangunnya GSB TK	Jumlah GSB TKN yang dibangun	0	0	0	0	1	1
		S.1.2.1	Terbangunnya RKB TK	Jumlah RKB TKN yang dibangun	2	0	0	4	6	6
	S2	Mutu Layanan Pendidikan		Persentase sekolah berakreditasi minimal B						
PAUD				36,46	41,35	45,00	48,00	53,00	60,00	
SD				53,58	56,00	61,00	64,00	67,00	70,00	
SMP				64,59	67,00	69,00	71,00	74,00	78,00	
S.2.1		Pembinaan dan Pengembangan PAUD		Jumlah lembaga PAUD	493	529	530	531	532	533
		S.2.1.1	Penyusunan dan Pengembangan kurikulum PAUD	Persentase guru yang mengikuti pelatihan K 13	78,40	80,20	83,00	86,00	92,00	100

	S.2.1.2	Kondisi layak guna Sarana dan prasarana PAUD	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi baik	71,26	74,60	77,00	80,00	82,00	84,00
	S.2.1.3	Peningkatan kecakapan motorik peserta didik PAUD	Persentase peserta didik yang mengikuti kegiatan kreasi anak PAUD	80,00	83,00	87,00	90,00	93,00	95,00
	S.2.1.4	Bangunan PAUD yang laik guna	Sekolah PAUD Bangunan Kondisi Baik	94.44	96.06	97.98	95.55	95.79	96.15
	S.2.2	Peningkatan status rapor mutu SD	Jumlah sekolah menuju kategori minimal SNP 3	279	281	286	291	296	301
	S.2.2.1	Penyusunan dan Pengembangan kurikulum SD	Persentase guru yang mengikuti pelatihan K 13	58,60	62,40	68,50	82,50	90,00	100
			Pelaksanaan ujian sekolah SD	ada	ada	ada	ada	ada	ada
	S.2.2.2	Peningkatan kualitas lulusan SD	Rata-rata nilai Ujian Sekolah SD	69,12.	69,50	70,00	70,50	71,00	71,50
			Angka Putus Sekolah SD	0.075	0,021	0,019	0	0	0
	S.2.2.3	Bangunan SD laik guna	Sekolah pendidikan SD bangunan kondisi baik	93.14	93.82	93.79	95.22	95.38	95.9
	S.2.2.4	Kondisi laik guna Sarana dan prasarana SD	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi baik	60,20	64,00	70,00	72,00	74,00	76,00
	S.2.2.5	Peningkatan Prestasi Akademik dan Non Akademik Siswa SD	Jumlah perolehan prestasi akademik minimal tingkat provinsi	2	2	3	3	3	3
			Jumlah perolehan prestasi non akademik minimal tingkat provinsi (dari 28 nomor lomba)	22	23	24	24	25	26

	S.2.3	Perluasan Akses Pendidikan Dasar SD		APK SD/MI/Paket A	103,47	104,2	104,6 2	104,8	105,1	105,61	
				APM SD/MI/Paket A	92	93	93,46	93,8	94,88	95,09	
		S.2.3.1	Terbangunnya GSB SD	Jumlah GSB SDN yang dibangun	0	0	0	2	2	2	
		S.2.3.2	Terbangunnya RKB SD	Jumlah RKB SDN yang dibangun	24	33	50	45	50	50	
	S.2.4	Peningkatan status rapor mutu SMP		Jumlah sekolah menuju kategori minimal SNP 3	116	119	124	129	133	137	
		S.2.4.1	Penyusunan dan Pengembangan kurikulum SMP	Persentase guru yang telah mengikuti pelatihan K 13	62,83	72,70	78,50	84,80	93,00.	100	
	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada		
		S.2.4.2	Peningkatan kualitas lulusan SMP	Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP	55,24	55,74	56,00	56,25	56,50	56,80	
	Angka Putus Sekolah SMP			1.51	0.054	0.05	0	0	0		
		S.2.4.3	Bangunan SMP laik guna	Sekolah pendidikan SMP bangunan kondisi baik	92.49	92.22	93.79	94.72	94.98	95.23	
		S.2.4.4	Kondisi layak guna Sarana dan prasarana SMP	Persentase sekolah memiliki sarana dan prasarana kondisi baik	60,20	60,60	70,00	71,30	72,50	75,00	
		S.2.4.5	Peningkatan prestasi akademik dan non akademik siswa SMP	Jumlah perolehan prestasi akademik minimal tingkat provinsi	2	2	3	3	3	3	
				Jumlah perolehan prestasi non akademik minimal tingkat provinsi (dari 28 nomor lomba)	28	28	28	28	28	28	
		S.2.5	Perluasan Akses Pendidikan Dasar SMP		APK SMP/MTs/Paket B	102,45	105,5	105,8 1	106,15	106,84	107,01
					APM SMP/MTs/PAket B	90,25	90,50	91,08	91,92	92,4	93,07

	S.2.5.1	Terbangunnya GSB SMP	Jumlah GSB SMPN yang dibangun	0	0	2	2	2	2	2
	S.2.5.2	Terbangunnya RKB SMP	Jumlah RKB SMPN yang dibangun	10	30	35	35	40	40	40
S.2.6	Mutu tenaga pendidik dan kependidikan PAUD, SD dan SMP		Persentase Pendidik dan tenaga Kependidikan PAUD, SD dan SMP berstandar SKM	18,83	20,25	21,30	22,72	24,19	25,65	
			Persentase Meningkatnya Kepala sekolah negeri yang memiliki sertifikat kepala sekolah	86,04	86,04	88,37	90,70	93,02	95,35	
	S.2.6.1	Peningkatan Guru PAUD bersertifikasi	Persentase Guru PAUD bersertifikasi pendidik	10,12	11,18	11,85	12,86	13,86	14,86	
	S.2.6.2	Peningkatan Guru SD bersertifikasi	Persentase Guru SD bersertifikasi pendidik	19,48	21,24	22,28	23,86	25,44	27,01	
	S.2.6.3	Peningkatan Guru SMP bersertifikasi	Persentase Guru SMP bersertifikasi pendidik	21,51	23,65	24,92	26,82	28,76	30,67	
	S.2.6.4	Peningkatan mutu guru kelas SD	Jumlah Guru SD yang mengikuti pelatihan guru kelas	198	298	398	500	600	700	
	S.2.6.5	Peningkatan mutu guru mata pelajaran SMP	Jumlah Guru SMP yang mengikuti pelatihan keahlian di bidang yang di ampu	128	230	330	440	550	650	
	S.2.6.6	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah TK	Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial	0	0	0	10	20	30	
	S.2.6.7	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah SD	Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial	31	31	31	51	71	90	
	S.2.6.8	Peningkatan kemampuan Manajerial Kepala Sekolah SMP	Jumlah Kepala sekolah yang sudah mengikuti pelatihan manajerial	19	19	19	39	59	80	
	S.2.6.9	Pembinaan Calon Kepala sekolah	Jumlah Guru yang memiliki sertifikat kepala sekolah	16	46	46	46	76	76	
	S.2.64.10	Peningkatan mutu Tenaga Kependidikan	Jumlah tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan keahlian	150	150	150	150	150	150	
S.2.7	Mutu pengawas sekolah		Jumlah Pengawas yang memiliki sertifikat pengawas dan penilik sekolah	70	70	100	100	100	100	

		S.2.7.1	Peningkatan Pengawas dan Penilik Sekolah yang bersertifikasi	Jumlah yang mengikuti diklat calon pengawas/ peningkatan Kompetensi Pengawas	0	41	34	38	41	41
	5.2.8	Publikasi dan Informasi Pendidikan Kota Batam		Tersedianya data informasi pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		5.2.8.1	Penyusunan Data dan Informasi Pendidikan Kota Batam	Tersedianya data pendidikan yang valid	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
S3	Penguatan tatakelola pelayanan pendidikan			Terlaksananya Tata Kelola Pelayanan yang Efektif dan Efisien	100	100	100	100	100	100
	S.3.1	Ketatalaksanaan pelayanan pendidikan daerah hinterland		Jumlah sekolah hinterland yang terlayani	66	66	66	66	66	66
		S.3.1.1	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Belakang padang	Jumlah sekolah yang terlayani	20	20	20	20	20	20
		S.3.1.2	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Bulang	Jumlah sekolah yang terlayani	15	15	15	15	15	15
		S.3.1.3	Penguatan layanan pendidikan daerah hinterland Kec. Galang	Jumlah sekolah yang terlayani	31	31	31	31	31	31
	S.3.2	Tata kelola perencanaan dan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel		Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan keuangan yang tepat waktu	100	100	100	100	100	100
		S.3.2.1	Peningkatan kualitas perencanaan program	Persentase dokumen perencanaan yang selesai tepat waktu	100	100	100	100	100	100
		S.3.2.2	Peningkatan kualitas pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan	Persentase dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang selesai tepat waktu	100	100	100	100	100	100
		S.3.2.3	Tata kelola keuangan dan aset yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase capaian pengelolaan realisasi keuangan tepat waktu sesuai dengan anggaran	100	100	100	100	100	100
				Persentase temuan hasil pemeriksaan internal/ eksternal yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100
	S.3.3	Tata kelola administrasi dan kepegawaian pada kantor dinas pendidikan		Persentase pelayanan administrasi pelayanan umum yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100

			Persentase pengelolaan kepegawaian yang terlayani	100	100	100	100	100	100
	S.3.3.1	Kenaikan pangkat dan penghargaan	Persentase kenaikan pangkat dan penghargaan aparatur	100	100	100	100	100	100
	S.3.3.2	Disiplin aparatur	Persentase kehadiran tepat waktu aparatur kantor dinas pendidikan	100	100	100	100	100	98,00
	S.3.3.3	Pembinaan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek	50	50	50	50	50	50
	S.3.3.4	Tindak Lanjut Administrasi Perkantoran	Persentase surat masuk yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100